

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketenagakerjaan secara terus menerus menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang cukup besar dan meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional.

Tenaga kerja adalah angkatan kerja yang bekerja minimal 36 jam seminggu. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dengan umur produktif, atau penduduk yang berumur 15 s/d 55 tahun, kecuali ibu rumah tangga, dan penduduk yang lagi mengikuti pendidikan (*school going age*) yang merupakan *potential supply* dari tenaga kerja secara nasional.¹

Tenaga kerja merupakan orang yang siap, mau, mampu melaksanakan pekerjaan. Tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tenaga kerja lah yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja.

¹ Henry faizal Noor, *Ekonomi Manajerial – edisi revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 474

Bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih mencari pekerjaan maka disebut penganggur. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya.² Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan, selain itu pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan.³

Besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, yang membuat para angkatan kerja tidak dapat berinovasi dengan menghasilkan

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.

³ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro Ed 2*, (Mitrawacanamedia, 2010), hlm 5

lapangan kerja sendiri atau menjadi seorang wirausaha melainkan bergantung terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima lapangan pekerjaan. Apalagi di era industri 4.0 ini, angkatan kerja harus lebih kreatif dan mempunyai keterampilan yang baik dalam menghadapi era ini.

Angkatan kerja di Indonesia terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, terdapat 124,01 juta orang penduduk bekerja atau bertambah 2,99 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, pengangguran mencapai 7 juta orang atau berkurang 40 ribu orang dari tahun 2017. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) LIPI, Triyono, mengungkapkan masalah ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya adalah kurangnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Apalagi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, tenaga kerja Indonesia dianggap belum memiliki kesiapan dan keterampilan (*skill*) yang mumpuni. Menurutnya, kekurangan *skill* turut disebabkan oleh rendahnya pelatihan keterampilan dan keahlian yang diterima tenaga kerja sebelum memasuki dunia kerja.⁴

Menurut ahli ekonomi Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dalam pembangunan. Dalam hal ini lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Lapangan kerja juga merupakan sumber pendapatan. Dengan demikian Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang optimal. Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁵

⁴ <https://beritagar.id/artikel/berita/masih-ada-7-juta-pengangguran-di-indonesia> di akses pada 30 Juli 2019

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda Kini Dan Ke Depan*, (Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003), hal 5

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten Tulungagung
Tahun 2015, 2017, 2018⁶

Kegiatan	Tahun		
	2015	2017	2018
Angkatan Kerja	547.466	537.081	569.310
Bekerja	525.867	524.884	554.475
Pengangguran	21.599	12.197	14.835
TPAK	69,63	67,15	70,62
TPT	3,95	2,27	2,61

Sumber : Tulungagung dalam angka 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kabupaten Tulungagung tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2017 tingkat pengangguran mengalami penurunan yang signifikan namun meningkat kembali di tahun 2018. Pengangguran sebesar 14.835 orang di tahun 2018 merupakan jumlah yang cukup besar. Angkatan kerja yang terus meningkat jika tidak di imbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maka pengangguran juga semakin meningkat. Untuk itu Pemerintah diharapkan terus menekan jumlah pengangguran tersebut dikarenakan masih rendahnya penempatan pencari kerja di pasar kerja.

⁶ Pada tahun 2016 tidak tersedia data karena pada tahun tersebut tidak di adakan survey nasional

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, stabil dan berkelanjutan serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil, banyak langkah yang bisa dilakukan, salah satunya memaksimalkan potensi sumberdaya manusia atau tenaga kerja.

Oleh karena itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk memecahkan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif. Hal tersebut diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan seluruh pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif akan memberikan imbalan dan penghargaan yang layak serta mempunyai peranan yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (*sosial disfunctions*). Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya

tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.⁷

Keberadaan instansi pemerintah sebagai lembaga yang membuat kebijakan dan wewenang dalam mengoptimalkan masalah tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. hal ini tercantum dalam undang-undang Pembangunan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) yang menyatakan *bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"* hal ini memberi petunjuk tentang hak warga negara yang sekaligus memancarkan asas keadilan dan kerakyatan.⁸

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

⁷ Mohammad Mulyadi, *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hal. 234

⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 9

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁹

Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan yang akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan khususnya masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Permasalahan mengenai kesempatan kerja ini menjadi semakin penting dan mendesak karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang terserap oleh lapangan kerja semakin sedikit. Hal ini berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin meningkat.

Tabel 1.2

Pencari kerja menurut pendidikan yang ditamatkan
kabupaten Tulungagung
Tahun 2016, 2017, 2018

Pendidikan Terakhir	Tahun		
	2016	2017	2018
Sekolah Dasar	674	648	713
Sekolah Menengah Pertama	1.699	1.828	2.102
Sekolah Menengah Atas	1.680	3.337	2.011

⁹ *Ibid*, hal 10

Diploma	63	159	240
Universitas	204	390	759
Jumlah	4.320	6.362	5.825

Sumber : Tulungagung dalam angka 2019

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans paling banyak adalah lulusan SMP dan SMA/SMK. Hal ini juga dikarenakan banyak masyarakat yang enggan meneruskan ke perguruan tinggi, mereka memilih setelah lulus SMP maupun SMA/SMK langsung mencari pekerjaan. Bagi mereka meneruskan ke Perguruan Tinggi tidak terlalu penting karena hanya akan membuang buang waktu dan uang, tetapi juga banyak dari mereka yang sulit mencari pekerjaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan jumlah penyediaan fasilitas kerja serta informasi pasar kerja yang memadai, peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan penyesuaian kembali kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi agenda yang penting bagi pemerintah yang harus segera diwujudkan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan ketika PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung bahwa Disnakertrans berperan dalam upaya mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung. Bisa dilihat dari progam-progam yang dijalankan Disnakerrans melalui Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Mutu tenaga kerja yang tergolong rendah di kabupaten Tulungagung dapat ditingkatkan dengan adanya pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan mutu tenaga kerja yang sesuai dengan bakat kemampuan dan keahliannya dalam pelatihan kerja. dalam pelaksanaannya Disnakertrans kabupaten Tulungagung memiliki 3 program unggulan, yaitu pelatihan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.¹⁰

Salah satu program penempatan tenaga kerja yang telah dilakukan ialah dengan mengadakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*). Program *Job Fair* ini bertujuan untuk mempertemukan antara para pencari kerja dan perusahaan-perusahaan yang menerima perkerjaan. Dengan adanya *Job Fair* para pencari kerja tidak perlu berkeliling dari perusahaan ke perusahaan lainnya, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini telah mewadahi dan telah memfasilitasi antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan para tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung juga mengadakan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan

¹⁰ Wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja di Disnakertrans Tulungagung pada hari Jum'at, 16 November 2018

kepada calon tenaga kerja sehingga kompeten di bidangnya “*tenaga kerja yang terlatih itu nantinya diharapkan akan dapat bersaing di pasar kerja, baik tingkat lokal maupun internasional*”.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu tenaga kerja yang berpengaruh besar hal ini disebabkan karena beberapa faktor, pengangguran dapat terjadi pada saat penambahan jumlah penduduk lebih besar dari pada penambahan lapangan kerja, akibatnya tidak semua penduduk produktif dapat ditampung oleh lapangan kerja yang ada.

Terjadinya pengangguran yang disebabkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja. Mereka tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang lebih baik. Akibatnya orang yang mempunyai kualitas tenaga kerja rendah akan menganggur, masalah tenaga kerja rendah disebabkan karena lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. selain itu, kurangnya informasi yang tersebar mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu akan progam pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Dari latar belakang yang kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pengangguran dengan judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengurangi**

¹¹ Wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja di Disnakertrans Tulungagung pada hari Jum’at, 16 November 2018

Pengangguran di Kabupaten Tulungagung (Studi kasus pada Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disajikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi pengangguran di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah upaya Disnakertrans kabupaten tulungagung dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana hasil progam Disnakertrans kabupaten tulungagung dalam Mengurangi Pengangguran di kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut

1. Menganalisis kondisi pengangguran di kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis upaya Disnakertrans kabupaten tulungagung dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung melalui bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Mengetahui hasil program Disnakertrans kabupaten tulungagung dalam Mengurangi Pengangguran di kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki dan dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga dan teori-teori dari peneliti, peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PENTA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung (Disnakertrans) dijadikan sebagai lokasi penelitian dimana Bidang PENTA merupakan divisi Disnakertrans yang mempunyai tugas perluasan dan penempatan tenaga kerja.
2. Penelitian dibatasi pada peranan Disnakertrans dalam menyiapkan tenaga kerja agar tenaga kerja mampu bersaing di dunia kerja melalui Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Subyek penelitian adalah Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnakertrans dan pencari kerja di kabupaten Tulungagung dimana keduanya merupakan penyelenggara dan peserta dalam melaksanakan program pemerintah yaitu dalam hal mengurangi pengangguran.
4. Obyek terfokus pada program PENTA yang diselenggarakan Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan untuk Pemerintah/lembaga

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan *good governance* terutama dalam bidang ketenagakerjaan khususnya tentang Peran Pemerintah dalam Mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

b. Kegunaan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Jurusan Ekonomi Syariah berguna sebagai peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

c. Kegunaan bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan serta dapat menjadi acuan literatur penelitian yang mengusung tema serupa.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi : halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 bab dengan rician sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk dilakukan penelitian,

kemudian rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, manfaat penelitian berisi tentang manfaat pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis, sistematika penulisan berisi tentang urutan – urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas uraian tentang teori peranan dan pengangguran

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan – tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan – pertanyaan atau pernyataan – pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang Peran Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP